

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km<sup>2</sup> dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini disebelah barat berbatasan dengan samudera hindia, di sebelah timur dengan laut jawa, di sebelah utara berbatasan langsung dengan provinsi sumatera selatan, dan disebelah selatan berbatasan dengan selat sunda. Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten yaitu:

- a. Kabupaten Lampung Barat dengan luas wilayah 2.142,78 km<sup>2</sup>
- b. Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah 700,32 km<sup>2</sup>
- c. Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah 3.802,68 km<sup>2</sup>
- d. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 5.325,03 km<sup>2</sup>
- e. Kabupaten Lampung Utara dengan luas wilayah 2.725,87 km<sup>2</sup>
- f. Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah 2.184,00 km<sup>2</sup>
- g. Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah 2.243,51 km<sup>2</sup>
- h. Kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 2.907,23 km<sup>2</sup>
- i. Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah 625,000 km<sup>2</sup>

- j. Kabupaten Tanggamus dengan luas wilayah 3.020,64 km<sup>2</sup>
- k. Kabupaten Tulang Bawang dengan luas wilayah 3.466,32 km<sup>2</sup>
- l. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas wilayah 1.201,00 km<sup>2</sup>
- m. Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup>
- n. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 296,00 km<sup>2</sup>
- o. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 km<sup>2</sup>



*Sumber: Blogspot.Com*

**Gambar 4.1** Peta Provinsi Lampung

## 2. Wilayah Administrasi Lampung

Secara administrasi Daerah Lampung terbagi menjadi 15 Kabupaten dan 2 kota Madya yaitu Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro dengan perincian sebagai berikut:

- a. kabupaten lampung barat terdiri dari 15 kecamatan dan 131 kelurahan.
- b. kabupaten lampung selatan terdiri dari 17 kecamatan dan 256 kelurahan.
- c. kabupaten lampung tengah terdiri dari 28 kecamatan dan 301 kelurahan.
- d. kabupaten lampung timur terdiri dari 24 kecamatan dan 264 kelurahan.
- e. kabupaten lampung utara terdiri dari 23 kecamatan dan 232 kelurahan.
- f. kabupaten Mesuji terdiri dari 7 kecamatan dan 105 kelurahan.
- g. kabupaten pesawaran terdiri dari 11 kecamatan dan 144 kelurahan.
- h. kabupaten pesisir barat terdiri dari 11 kecamatan dan 116 kelurahan.
- i. kabupaten pringsewu terdiri dari 9 kecamatan dan 126 kelurahan.
- j. kabupaten tanggamus terdiri dari 20 kecamatan dan 299 kelurahan.
- k. kabupaten tulang bawang terdiri dari 15 kecamatan dan 147 kelurahan.
- l. kabupaten tulang bawang barat terdiri dari 9 kecamatan dan 93 kelurahan.
- m. kabupaten way kanan terdiri dari 14 kecamatan dan 221 kelurahan.
- n. kota bandar lampung terdiri dari 20kecamatan dan 126 kelurahan.
- o. kota metro terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.

### 3. Iklim Lampung

Provinsi Lampung merupakan daerah yang beriklim tropis dengan kondisi cuaca yang cukup panas dan juga banyak turun hujan. Musim kemarau berlangsung antara bulan Mei -September dan musim penghujan antara November – Mei. Angka hujan rata-rata tahunan mencapai 2.000 – 3.000 mm, bahkan di bagian barat mencapai 3.000 – 4.000 mm/tahun sedang di bagian timur Lampung Selatan 1.000 – 2.000 mm/tahun. Pada daerah ketinggian 30 – 60 m suhu rata-rata berkisar antara 26° C – 28° C. Suhu maksimum 33° C dan suhu minimum 22° C. Rata-rata kelembaban udara antara 80% – 88% dan pada daerah yang lebih tinggi kelembabanya juga akan lebih tinggi lagi.

### 4. Kependudukan Lampung

Berdasarkan pola fertility, mortalitas dan migrasi, proyeksi populasi penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2017 mencapai 8,29 juta jiwa atau rangking kedua terbanyak di wilayah Sumatera. Banyaknya jumlah penduduk tersebut dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi tergantung dari aspek kualitasnya. Ini dapat direfleksikan melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan. Ditinjau dari segi tingkat pendidikan terlihat bahwa penduduk yang berusia 15 tahun keatas didominasi oleh mereka yang berpendidikan tamat Sekolah Dasar yakni sekitar 28,12 persen (Susenar, 2017). Rendahnya kualitas penduduk tersebut merupakan sinyal kebijakan kependudukan terkait aspek kualitas yang belum berhasil.

Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Lampung di tahun 2017 telah mencapai 239 jiwa/km<sup>2</sup> dimana penyebaran penduduknya masih belum merata

antar wilayah. Kota Bandar Lampung Dan Metro memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di provinsi Lampung, masing-masing sebanyak 3.432 jiwa/km<sup>2</sup> dan 2.638 jiwa/km<sup>2</sup>. sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Pesisir Barat dan Mesuji masing-masing sebanyak 52 jiwa/ km<sup>2</sup> dan 91 jiwa/ km<sup>2</sup>. Kesenjangan didaerah tersebut sangatlah mencolok antar kabupaten/kota ini lebih disebabkan karena perbedaan infrastruktur yang dimiliki. infrastruktur yang dimiliki oleh wilayah perkotaan lebih lengkap.

## **B. Gambaran Umum Variabel Penelitian**

### **1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia atau kesejahteraan yang berjalan dalam suatu daerah, Dalam pengukuran indeks diperlihatkan melalui angka kesehatan, pendidikan dan juga pengeluaran per kapita ataupun daya beli masyarakat yang dihitung dalam periode tertentu (biasanya dalam satu tahun). Pembangunan manusia bisa diartikan sebagai proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik disuatu negara. Pembangunan manusia juga merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk, hal ini dikarenakan manusia merupakan modal utama yang berperan dalam terciptanya suatu pembangunan disuatu negara.

**Tabel 4.1**  
Perkembangan IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2010-2017

Kabupaten di Provinsi Lampung	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	60.93	61.92	62.51	63.21	63.54	64.54	65.45	66.06
Tanggamus	60.09	60.63	61.14	61.89	62.27	63.66	64.41	64.94
Lampung Selatan	61.07	61.95	62.68	63.35	63.75	65.22	66.19	66.95
Lampung Timur	63.23	64.1	65.1	66.07	66.42	67.1	67.88	68.05
Lampung Tengah	64.14	64.71	65.6	66.57	67.07	67.61	68.33	68.95
Lampung Utara	61.82	62.67	62.93	64	64.89	65.2	65.95	66.58
Waykanan	61.27	62.04	62.79	63.92	64.32	65.18	65.74	65.97
Tulang Bawang	63.21	63.67	64.11	64.91	65.83	66.08	66.74	67.07
Pesawaran	58.64	59.44	59.98	60.94	61.7	62.7	63.47	64.43
Pringsewu	63.78	64.86	65.37	66.14	66.58	67.55	68.26	68.61
Mesuji	56.83	57.32	57.67	58.16	58.71	59.79	60.72	61.87
T. Bawang Barat	59.89	60.13	60.77	61.46	62.46	63.01	63.77	64.58
Kota Bandar Lampung	71.11	72.04	72.88	73.93	74.34	74.81	75.34	75.98
Kota Metro	71.37	72.23	72.86	74.27	74.98	75.1	75.45	75.87

*Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2017*

Dari tabel 1.1 diatas Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sangat beragam. pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Metro, dan posisi kedua berada di Kota Bandar Lampung. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia yang paling rendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 61.87 pada tahun 2017. Sangat jauh perbedaannya dibandingkan dengan Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Peran pemerintah daerah sangatlah penting untu melaksanakan fungsi alokasi untuk sumber daya yang dimiliki oleh daerah di berbagai sektor-sektor, dan juga bisa meningkatkan pelayanan public sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan publik masyarakat, kesehatan, pendidikan serta perekonomian menjadi prioritas pemerintah daerah yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia.

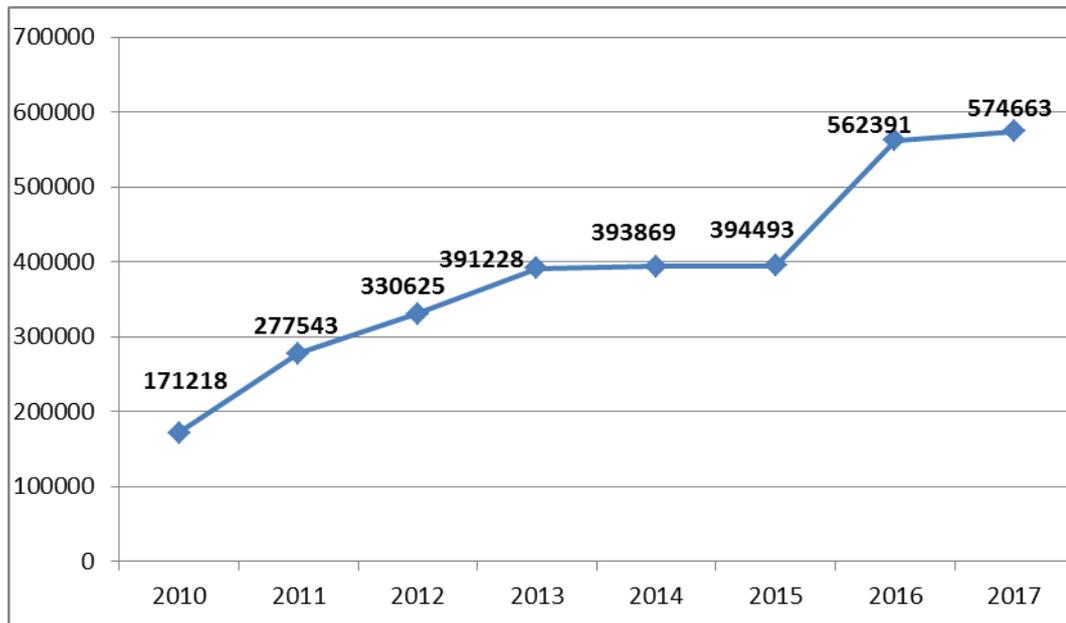
Dana alokasi baik dibidang kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum harus diperhatikan dan dipertimbangkan lebih baik supaya bisa tercapainya pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

## **2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan**

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan salah satu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. semakin tinggi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan secara tidak langsung diharapkan jumlah masyarakat yang sehat akan semakin banyak.

Undang-undang di Indonesia yang mengatur terkait anggaran belanja pemerintah bidang kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.

Menurut Todaro & Smith (2003) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan adalah guna memenuhi salah satu hak dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.



*Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2010-2017*

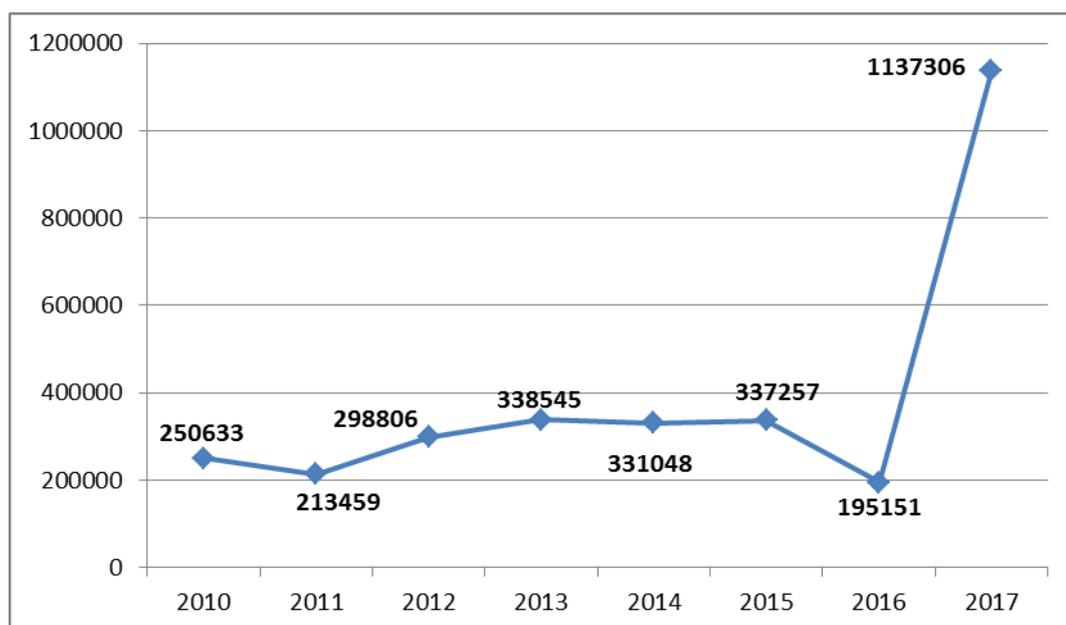
#### **Gambar 4.2**

**Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Lampung (Juta Rupiah)**

Dapat kita lihat pada gambar 4.2 diatas yang menunjukkan bahwa anggaran pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan pemerintah Provinsi Lampung dari tahun 2010-2017 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2015 sebesar 394.493 juta rupiah menjadi 562.391 juta rupiah pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan kembali mengalami peningkatan menjadi 574.663 juta rupiah. Dari data diatas kita bisa melihat bahwa pemerintah Provinsi Lampung sangat serius dalam memperhatikan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung dengan terus meningkatkan anggaran belanja pada bidang kesehatan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan studinya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah juga bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk dapat mengerti, kemudian menerapkannya dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa (Meier dalam Winarti, 2014).



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2010-2017

**Gambar 4.3**

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Lampung (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.3 diatas bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung di bidang pendidikan dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi. Pada

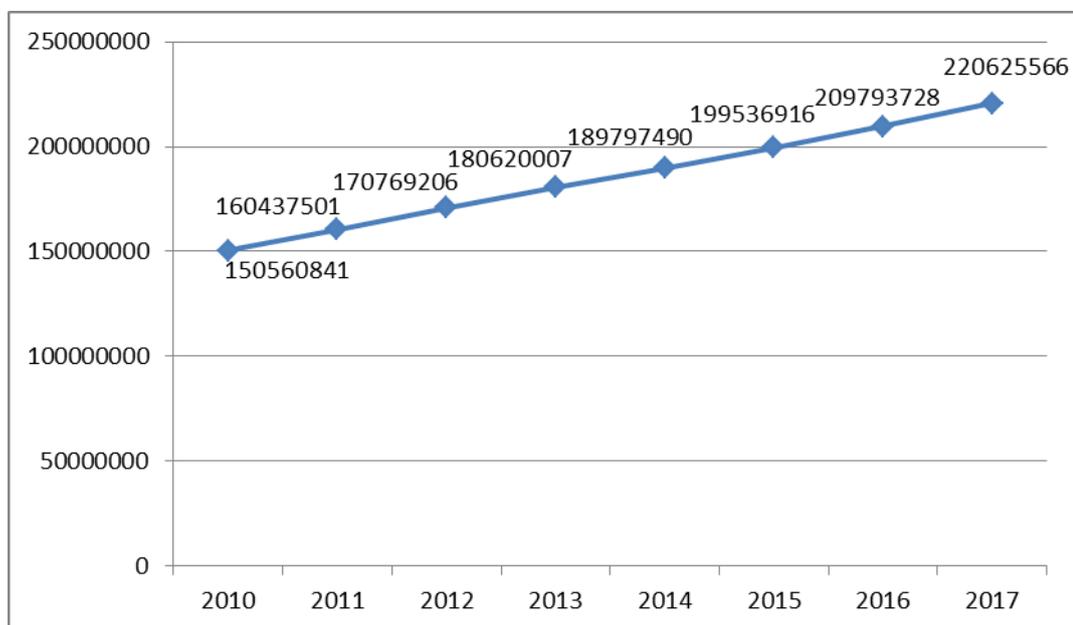
tahun 2010 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 250.633 juta rupiah turun menjadi 213.459 juta rupiah pada tahun 2011. Kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2013 sebesar 338.545 juta rupiah. Pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 331.048 juta rupiah dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 337.257 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 195.151 juta rupiah dan kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 1.137.306 juta rupiah. Dari penjelasan diatas yang mengalami fluktuasi menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung masih belum serius dalam menangani pendidikan. Pemerintah kurang menyadari peran anggaran dibidang pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Investasi dalam hal pendidikan sangatlah dibutuhkan maka dari itu pemerintah harus bisa membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik lagi. Alokasi terhadap anggaran pengeluaran pemerintah pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang dapat bisa

menjadikan berubahnya pendapatan nasional rill. Kenaikan pendapatan ini menunjukkan presentase dari pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu yang bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB yang merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir yang mencakup nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2017

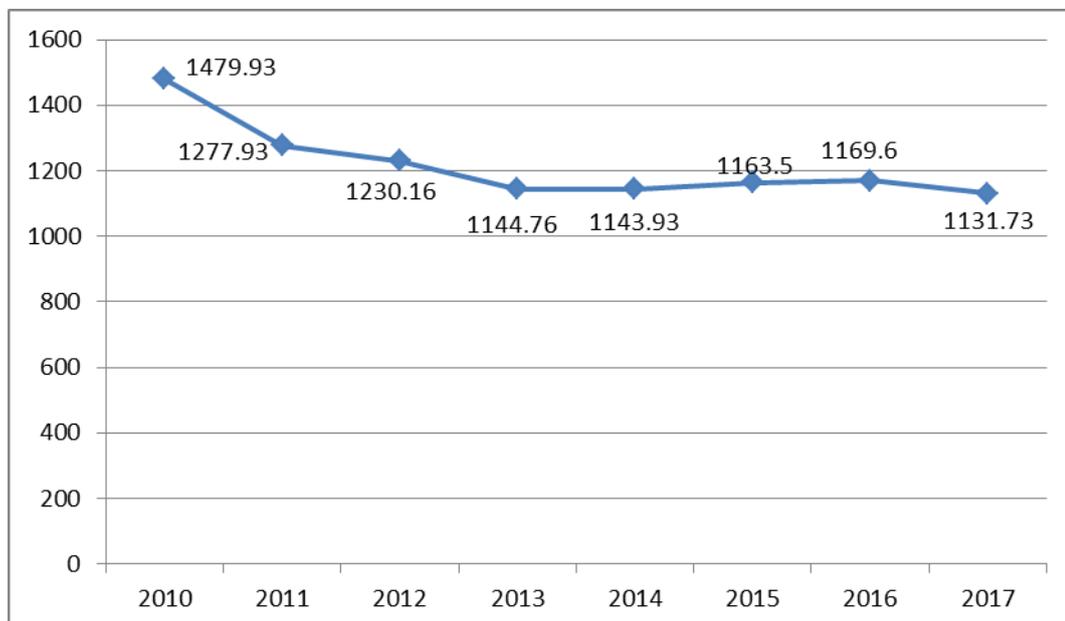
**Gambar 4.4**  
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (Juta Rupiah)

Dari gambar 4.4 diatas bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung disetiap Tahunnya mengalami peningkatan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan karena pembangunan ekonomi mulai berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah

dapat digunakan untuk melancarkan kegiatan ekonomi yang ada di daerah tersebut sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi pun juga dipercepat proses dan pelaksanaannya. Pembangunan ekonomi yang cepat diselesaikan didalamnya terdapat kegiatan ekonomi, sehingga jika pembangunan ekonomi tumbuh pesat maka kegiatan ekonomi didalamnya dapat berjalan dengan lancar.

## 5. Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan air minum, Hal inilah berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga mempunyai arti tidak adanya akses pendidikan dan akses pekerjaan yang bisa mengatasi permasalahan kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2017

**Gambar 4.5**  
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung (Ribu Jiwa)

Berdasarkan gambar 4.5 diatas Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung dari tahun 2010 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 1479.93 ribu jiwa turun menjadi 1143.93 ribu jiwa pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 1163.50 ribu jiwa dan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 1169.60 ribu jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 1131.73 ribu jiwa. Pemerintah Provinsi Lampung harus berupaya menanggulangi kemiskinan. Salah satunya dengan menjaga setabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang tujuannya menjamin daya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok selain beras.